

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Adys, *Sistem Hukum dan Negara Hukum*, Suluh Media, Yogyakarta, 2019.
- Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Pres, Sleman, 2017
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019.
- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1988
- Putera Astomo, *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 2010

Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Remaja Rosadakarya, Bandung, 2014.

V. Hadiyono, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2018

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil

### **C. Sumber lain**

Imade Pasek Diartha *“Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,”* Kencana, Jakarta 2017

Joenaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, *“Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, Kencana, Jakarta, 2016.

”<https://m.hukumonline.com/berita/baca/ltbe426e49644e/alasan-ma-batalkan-larangan-pengurus-parpol-jadi-anggota-dpd-untuk-pemilu-2019/>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_multipartai](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_multipartai)

Aditya Warman, “Sistem Kepartaian dan Pembangunan Politik Indonesia, Jurnal Universitas Galuh Ciamis

<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengurus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusi>